

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN ROTAN DI KOTA PEKANBARU

Petir Papilo

Jurusan Teknik Industri – Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAKSI

Industri kerajinan rotan merupakan salah satu jenis usaha yang bersifat home industry yang telah lama berkembang di Kota Pekanbaru. Semenjak krisis ekonomi tahun 2009, semakin lama jumlah kelompok masyarakat yang masih bertahan menjalankan usaha kerajinan rotan di Kota Pekanbaru semakin lama semakin berkurang. Oleh karenanya perlu perhatian berbagai pihak terkait dalam upaya menyelamatkan salah satu jenis industri yang menjadi penopang perekonomian sebagian masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini. Dalam kajian ini, melalui pendekatan SWOT Analysis telah diketahui bahwa dari 6 faktor internal yang teridentifikasi telah diketahui bahwa, nilai skor total untuk faktor kekuatan (S) adalah sebesar 0,71 dan faktor kelemahan (W) adalah sebesar 2,10. Hal ini menjelaskan bahwa secara internal masyarakat pengrajin rotan memiliki lebih banyak kelemahan dengan nilai akhir sebesar -1,39. Sementara itu, pada faktor eksternal, dari 6 faktor yang diperhatikan dapat diketahui bahwa, nilai faktor peluang (O) yang ada dimasyarakat pengrajin rotan masih cukup tinggi yakni sebesar 2,64 sedangkan nilai faktor ancaman (T) yang mungkin terjadi adalah sebesar 1,13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat peluang masih cukup besar bagi pengembangan usaha kerajinan rotan di Pekanbaru dengan nilai total skor sebesar 1,51. Oleh karenanya, berdasarkan kondisi yang ada, perlu diterapkan strategi pengembangan yang mampu memperkecil kelemahan dan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam meraih peluang-peluang yang ada.

Kata Kunci : *Industri Kerajinan Rotan, Pemberdayaan Masyarakat, SWOT Analysis.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda dunia, sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan industri di tanah air. Industri padat modal yang pada umumnya memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar, merupakan salah satu sektor yang sangat terbebani dan bahkan terpaksa harus melaksanakan efisiensi.

Jika dilihat dari kebijakan makro ekonomi Pemerintah baik dari sudut kebijakan fiskal maupun moneter, dapat terlihat bahwa sektor industri memegang peranan strategis dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pembentukan PDB sangat besar. Pada tahun

2004-2012, industri pengolahan (migas dan non-migas) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, dimana pada tahun 2004 mencapai 28,07% dan pada tahun 2012 sebesar 23,98%. Meskipun mengalami penurunan, peranan sektor industri pengolahan terhadap PDB tetap yang paling besar, diikuti sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 14,44%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,90%, pertambangan dan penggalian sebesar 11,78%, sektor jasa-jasa sebesar 10,78%, serta sektor konstruksi/bangunan sebesar 10,45%. (Kementrian Perindustrian, 2013)

Sektor industri mampu berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Industri juga dapat

membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 sekitar 14 juta orang (termasuk industri mikro, kecil dan menengah), tenaga kerja sektor industri turut memberikan kontribusi sebesar 12-13% terhadap total tenaga kerja nasional.

Industri kecil dan mikro yang kebanyakannya dikelola oleh masyarakat dalam bentuk *home industry*, bisa dikatakan merupakan industri yang paling mampu bertahan terhadap dampak krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. Industri dengan tingkat penggunaan modal yang tidak terlalu besar, cenderung mampu bertahan terhadap resiko dan gejolak ekonomi yang terjadi. Namun, ditengah upayanya untuk terus eksis di dalam dunia usaha, kebanyakan industri kecil cenderung sulit untuk bangkit dan berkembang secara lebih meluas dikarenakan kendala mendasar yang memang belum mampu teratasi. Oleh karenanya, agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup para pelaku industri yang menyentuh kepada sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil tersebut, perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

Suwandi (2002) seperti yang dikutip dalam Ahmad (2005) mengatakan bahwa, industri kecil juga belum memiliki bentuk organisasi yang mampu menghadapi perubahan pasar yang begitu pesat, karena struktur organisasi internalnya masih sederhana dan tidak memiliki pembagian tugas yang begitu jelas di

antara para tenaga kerjanya. Bagian pemasaran, produksi atau keuangan diserahkan kepada anggota keluarga yang lain sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya internal audit karena biasanya saling memaklumi dikarenakan keluarga sendiri. Ini menyebabkan industri kecil tidak dapat melaksanakan usaha secara profesional. Untuk itu, perlu pengupayaan agar penyelenggaraan usaha kecil dapat dilakukan secara profesional (komunikasi dan kerja tim), meningkatkan kemampuan manajerial (kepemimpinan dan pengelolaan yang bersifat fungsional dan bukan lini) serta perbaikan iklim usaha dan budaya kerja.

Industri kerajinan rotan merupakan salah satu industri kecil yang berkembang di Provinsi Riau. Industri kerajinan rotan banyak dijumpai di Provinsi Riau, khususnya di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Secara spontan sentra industri tersebut membentuk kelompok-kelompok yang berkembang di daerah Jl. Yos Sudarso Kota Pekanbaru. Industri ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja pada wilayah tersebut.

Namun semenjak terjadinya krisis ekonomi, banyak pengusaha industri kerajinan rotan beralih kepada jenis usaha lain. Sehingga semakin lama, jumlah anggota masyarakat yang masih bertahan dalam menjalankan usaha dibidang kerajinan rotan ini, lambat laun semakin berkurang. Oleh karena perlu ada upaya secara bersama-sama, melalui kerjama berbagai pihak seperti halnya pemerintah, dunia usaha,

perguruan tinggi dan perbankan agar turut andil dalam upaya menyelamatkan satu jenis industri rakyat yang semakin berkurang ini.

Program pemberdayaan merupakan salah satu solusi konkret yang dapat dilaksanakan. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pengrajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru, terutama di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu terlebih dahulu dilakukan penganalisaan berkait dengan kondisi perkembangan usaha kerajinan rotan di Pekanbaru tersebut. Kajian dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap aspek – aspek yang bersifat internal seperti kekuatan (*stregth*), kelemahan (*weakness*) dan faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) serta ancaman (*treath*) yang ada pada kelompok masyarakat yang bergerak dalam usaha kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru yang terangkum kedalam bentuk analisis SWOT. Hasil analisis SWOT ini akan dijadikan sebagai landasan dalam upaya mewujudkan program pemberdayaan masyarakat khususnya para pengrajin rotan yang berada di kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Tujuan dan Sasaran

Secara umumnya, tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini adalah agar

masyarakat pengrajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru dapat tumbuh berkembang secara mandiri, yang terlihat dari penerapan konsep-konsep produksi secara baik melalui penggunaan teknologi secara tepat, proses pengolahan yang terlaksana secara efektif dan efisien, proses pengendalian mutu yang menjamin ketersediaan produk yang berkualitas serta penerapan strategi pemasaran yang dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen.

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengetahui kondisi perkembangan masyarakat pengrajin rotan yang ada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui kondisi internal yang terdiri dari aspek-aspek kekuatan dan kelemahan yang ada dalam upayanya mewujudkan program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengrajin rotan di Kota Pekanbaru.
3. Menganalisis peluang serta ancaman yang mungkin akan dihadapi dalam upaya mewujudkan program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengrajin rotan di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
4. Menyusun rancangan strategi pengembangan masyarakat pengrajin rotan Pekanbaru, melalui kerjasama berbagai pihak, sesuai dengan peran dan tanggung jawab setiap lembaga terkait.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini antara lain :

1. Tergambarkannya peta kondisi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru dilihat dari aspek-aspek yang bersifat strategis dan teknis seperti status usaha, permodalan, sumber daya manusia dan pemasaran.
2. Tersusunnya suatu usulan program pemberdayaan yang betul-betul dapat diterapkan bagi upaya menumbuhkembangkan industri kerajinan rotan yang ada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Dalam kamus Bahasa Inggris, pemberdayaan diartikan dari kata “*empowerment*” yang jika ditinjau dari aspek etimologi, berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan, kekuatan dan kemampuan.

Adi (2003) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya mengembangkan individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya guna dalam upaya mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Gagasan pemberdayaan menurut Margot Breton (1994) dalam Eko (2002). berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif

pembangunan yang dirumuskan menurut cara pandang modernisasi. Pada intinya, paradigma lama (pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan

tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut : (Ife, 1996:59)

1. **Struktural**, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. **Pluralis**, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu.
3. **Elitis**, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha

melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.

4. **Post-Strukturalis**, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Melalui tabel berikut ini, dapat dilihat perbandingan pemaknaan antara pembangunan bentuk paradigma lama dan pemberdayaan sebagai wujud pemikiran modernisasi.

TABEL - 1
Pergeseran Paradigma dalam Pembangunan Masyarakat

Dimensi	Paradigma Lama (Pembangunan)	Paradigma Baru (Pemberdayaan)
Fokus Utama	Fokus pada pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
Tingkat Keterlibatan	Redistribusi oleh negara	Proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan
Nilai – nilai yang diutamakan	Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan	Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll.
Orientasi	Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil	Negara membuat lingkungan yang memungkinkan untuk berkembang secara mandiri
Keterlibatan Negara dalam pelayanan	Negara menyediakan layanan ketahanan social	Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial
Implementasi Teknologi	Transfer teknologi dari negara maju	Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris
Pengembangan Aset	Transfer aset-aset berharga pada negara maju	Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin
Indikator Pembangunan	Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah	Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat.
Lingkup	Sektoral	Menyeluruh
Struktur	Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek	Organisasi belajar non-hirarkis
Peran Negara	Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar	Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi masyarakat

Sumber : Diadaptasi dari A. Shepherd, *Sustainable Rural Development* (London: Macmillan Press, 1998),

Sasaran Pokok Pemberdayaan

Sumodiningrat (1998) mengatakan bahwa sedikitnya terdapat tiga sasaran pokok kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu *pertama*, meningkatkan pendapatan masyarakat tingkat bawah dan menurunkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, *kedua*, berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di daerah pedesaan, *ketiga*, berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.

Program pengembangan masyarakat semestinya dilakukan dalam kerangka berkelanjutan. Dalam konteks ini, apabila pengembangan masyarakat bermaksud membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, maka struktur dan prosesnya haruslah berkelanjutan. Struktur yang berkelanjutan ditandai dengan pelembagaan pelaksanaan pengembangan masyarakat tidak hanya pada tatanan pelaksanaan proyek semata, namun diharapkan lebih mengutamakan peningkatan kemampuan hidup masyarakat (Gunardi dan Sarwoprasodjo, 2003).

Tugas - tugas Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh banyak elemen, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa

ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati. (Eko, 2002)

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. (Eko, 2002)

Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik.

Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya sendiri.

Pada pemikiran lain, Eko (2002) mengatakan bahwa, pada dasarnya “orang luar” jangan sampai berperan sebagai “pembina” atau “penyuluh”, melainkan sebagai “fasilitator” terhadap pemberdayaan masyarakat. Fasilitator itu adalah pendamping, yang bertugas memudahkan, mendorong, dan memfasilitasi kelompok sosial masyarakat dalam rangka memberdayakan dirinya. Tugas-tugas itu dimainkan mulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi, dan advokasi kebijakan.

Untuk memainkan peran-peran dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, para pekerja/fasilitator harus bersikap profesional, memiliki sejumlah kemampuan dan keterampilan. Mereka harus kompeten, punya kemampuan dalam memahami teori secara holistik dan kritis, bertindak praktis, membuat refleksi dan praksis. Esensi praktis adalah bahwa orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, bersama-sama. Ini adalah proses dimana teori dan praktik dibangun pada saat yang sama. Praksis lebih dari sekedar tindakan sederhana, tetapi mencakup pemahaman, belajar dan membangun teori. Setiap unsur yang terlibat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, tidak

hanya butuh “belajar” keterampilan, tetapi juga “mengembangkan” keterampilan itu sendiri. Yang perlu dikembangkan adalah: kemampuan analisis, kesadaran kritis, pengalaman, belajar dari pihak lain, dan intuisi (Eko, 2002).

Permasalahan Industri Kecil

Industri kecil merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang pada dasarnya penanganan dan pengelolaannya yang bersifat padat karya dengan teknik dan tatacara yang bersifat sederhana dan tradisional. Syaifuddin dan Chotimin (1994) mengatakan bahwa industrin kecil adalah penggolongan suatu unit usaha yang pada umumnya menggunakan jumlah tenaga kerja yang terlibat atau modal yang dikuasai, artinya industri kecil identik dengan usaha kecil yang dilakukan oleh rumah tangga yang dikelompokkan dengan hanya memperhatikan jumlah tenaga kerja dan tanpa memperhatikan berapa banyak modal yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.

Sayogyo dan Tambunan (1992) juga mengatakan bahwa mayoritas industri kecil dan rumah tangga merupakan usaha milik keluarga dimana kontrol mutu produk yang masih rendah serta tingkat kepekaan bisnis yang juga rendah. Derajat ketahanan dan perkembangan usaha industri kecil umumnya sangat tergantung pada keadaan pengelolaan internal dan faktor lingkungan, karena hal tersebut perlu diciptakan kelembagaan yang berfungsi membina usaha-usaha kecil tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri kecil berdasarkan jumlah tenaga kerja

yang berkisar antara 5 hingga 19 orang. Sedangkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang mempunyai aset tidak lebih dari Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kendati banyak definisi mengenai usaha atau industri kecil, namun industri kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam.

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelolaan perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. **Kedua** rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga industri kecil cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir. Ketiga, sebahagian usaha kecil ditandai dengan belum dimilikinya izin usaha atau status badan hukum (Zulkarnain, 2001)

Dibandingkan industri skala menengah dan industri padat modal, industri kecil umumnya memiliki kekuatan dalam upaya penggerakan ekonomi masyarakat. Adapun faktor kekuatan yang dimiliki oleh industri kecil antara lain : pengalaman jual beli atau bisnis, mandiri dan struktur pelaksanaan yang sederhana, memiliki kepekaan dan elastisitas tinggi dalam pemasaran, ulet dalam pemecahan persoalan, efektif dan efisien. Namun, disamping kekuatan, industri kecil juga memiliki banyak

kelemahan antara lain : lemah dari segi manajemen, kurang berorientasi pada masa depan, kurang memiliki kesesuaian antara pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan, kurang dari segi penataan keuangan, kurang dari segi analisis berkait dengan pemasaran, kurang dari segi pengkaderan serta terbatas pengetahuan tentang hukum dan perizinan (Saragih, J. dkk, 2000)

Senada dengan Saragih, J dkk (2000), Zulkarnaen (2003) menyatakan bahwa kelemahan esensial usaha kecil dan menengah adalah berkait dengan kemampuan manajemen, permodalan dan akses terhadap sumber modal, pasar dan informasi pasar, penggunaan teknologi, serta beberapa aspek internal dan eksternal lainnya. Oleh karena itu penanganan usaha kecil pada konteks pengembangan usaha terkait dengan aspek kelembagaan selama ini terkesan tidak sinkron, terutama antara aspek pembinaan dan pembiayaan.

METHODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Berkait dengan permasalahan yang ada, melalui kajian yang komprehensif, dicoba untuk dilakukan upaya penanggulangan terutama untuk menyelamatkan industri rotan yang menjadi salah satu sumber penghidupan sebagian masyarakat Kota Pekanbaru.

Sebelum dilakukan langkah lebih nyata, penting untuk terlebih dahulu dilakukan pengkajian mengenai kondisi masyarakat pengrajin rotan saat ini. Melalui hasil kajian ini akan menjadi tolok ukur perancangan program

pemberdayaan yang tepat sasaran dengan melibatkan berbagai pihak dan lembaga Provinsi Riau, sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

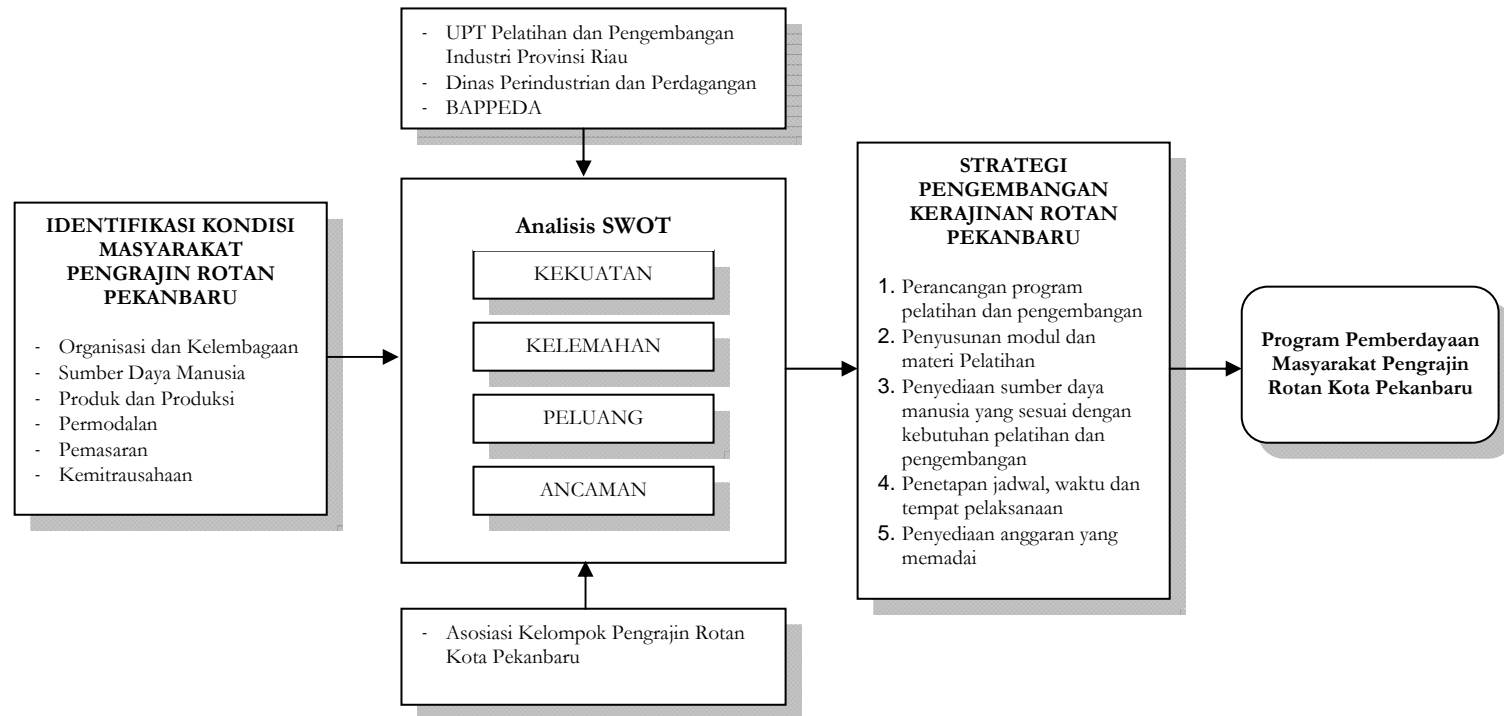
Konsep pemberdayaan sesungguhnya mengarahkan agar masyarakat sadar akan kondisinya saat ini, memahami peluang dan tantangan yang dihadapi serta secara mandiri baik berkelompok maupun individu menentukan solusi terbaik bagi upaya pengembangan usaha masing-masing. Oleh karenanya keberadaan berbagai lembaga dan instansi di Provinsi Riau bukanlah sebagai pihak yang paling benar ataupun pihak yang paling mengetahui solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Berbagai lembaga yang ada baik di tingkat pemerintah maupun dari kalangan perguruan tinggi berperan sebagai lembaga mediasi bagi setiap kalangan masyarakat pengrajin rotan, baik secara berkelompok maupun individu melakukan diskusi ataupun konsultasi untuk membahas permasalahan dan mencari solusi terbaik bagi upaya penumbuhkembangan kerajinan rotan yang mereka jalani.

Metode Penelitian

Untuk dapat merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran, perlu dilakukan pengidentifikasian mengenai kondisi serta perkembangan usaha kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru. Sebelum dilaksanakan pengkajian secara empiris, identifikasi dilakukan dengan melakukan survey ke wilayah yang menjadi target pelaksanaan program. Beberapa hal yang diidentifikasi antara lain adalah :

- a. Jumlah Industri kecil rotan yang masih berkembang di Kota Pekanbaru hingga saat ini.
- b. Kondisi setiap usaha dilihat dari aspek-aspek yang bersifat strategis seperti kondisi wilayah usaha, kepemilikan aset, potensi pasar, perizinan, permodalan, kerjasama (asosiasi) ataupun yang bersifat teknis seperti jumlah tenaga kerja dan kualifikasinya, ketersediaan teknologi, keragaman produk dan produk unggulan, kemampuan manajerial serta ketersediaan bahan baku.

Untuk dapat menyusun rencana program pemberdayaan industri masyarakat khususnya para pengrajin rotan yang ada di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan proses pengumpulan data dengan beberapa metode antara lain :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara langsung melihat praktek dan kondisi industri kecil kerajinan rotan yang menjadi objek amatan. Melalui observasi dilakukan pengamatan secara langsung mengenai kondisi pengrajin rotan di jalan Yos Sudarso Kelurahan Meranti Panda Kota Pekanbaru. Adapun data yang dikumpulkan melalui observasi tersebut antara lain adalah : nama organisasi, pimpinan organisasi, kondisi aset usaha, bahan baku utama, tingkat produksi, sumber daya manusia (jumlah, pendidikan dan pengalaman, omset per tahun, produk unggulan, kemitraan.

b. Wawancara dan Diskusi

Untuk mendapatkan data yang spesifik, perlu pula dilakukan pengumpulan data melalui proses tanya jawab. Seperangkat pertanyaan terlebih dahulu dipersiapkan, terutama berkaitan dengan karakteristik dan perkembangan usaha rotan yang menjadi objek amatan. Beberapa aspek yang dipertanyakan melalui wawancara antara lain : permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap pengrajin rotan, solusi-solusi yang pernah dilakukan, keterlibatan unsur lain (pemerintah, perguruan tinggi, swasta) di dalam pengembangan masyarakat pengrajin rotan, bentuk kerjasama yang telah telah terjalin.

c. Telaah Dokumen

Untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan analisis nantinya, diperlukan pula

penelaahan terhadap dokumen – dokumen yang mengandung data-data yang berkait dengan topik kajian. Telaah dokumen dapat bersumber dari catatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru ataupun dokumen arsip yang terdapat pada asosiasi pengrajin rotan tersebut.

d. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan seperangkat instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan karakteristik kondisi usaha yang nantinya akan dituangkan kedalam komponen-komponen pada Analisis SWOT.

Instrumen Penelitian

Untuk keperluan analisis data, terlebih dahulu perlu dirancang instrumen yang dapat membantu proses pengumpulan data. Secara umum data dibagi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan fungsinya, yakni :

a. Instrumen Pemetaan Sosial Masyarakat Pengrajin Rotan

Pemetaan sosial merupakan penggambaran karakteristik kondisi masyarakat pengrajin rotan berdasarkan aspek-aspek yang bersifat strategis dan bersifat teknis. Adapun data yang akan dikumpulkan terdiri dari : Nama Organisasi, Nama Pimpinan, Alamat, Tahun Pendirian, Izin Usaha, Total Aset, Tingkat Produksi, Tenaga Kerja, Omset per tahun, Bahan Baku Utama dan Produk Unggulan, Kemitraan, dan Pasar Sasaran.

b. Instrumen Faktor Analisis SWOT

Untuk mendapatkan data yang nantinya menjadi bahan analisis SWOT, perlu pula dirancang alat pengumpulan data yang berisi pertanyaan berkaitan dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) dilihat dari kondisi perkembangan usaha kerajinan rotan di Pekanbaru.

Setiap faktor tersusun atas variabel-variabel yang merupakan hasil jejak pendapat yang telah dilakukan melalui proses diskusi. Setiap variabel diberikan nilai bobot berdasarkan tingkat kepentingannya. Adapun kriteria pembobotan mengikuti format Skala Likert yang membagi kriteria ke dalam 5 (lima) tingkatan seperti dijelaskan pada tabel berikut:

TABEL – 2
Kriteria Penilaian Responden

Skala	Bobot
1	Sangat Rendah
2	Rendah
3	Cukup
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

Metode Analisis Data

Dalam kajian ini pengolahan data menyesuaikan dengan kebutuhan kajian, dimana untuk menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif data seperti jumlah pengrajin rotan, jumlah pekerja setiap pengrajin rotan, tingkat produksi menurut produk, serta data perkembangan lainnya dari setiap usaha kerajinan rotan yang tergabung ke dalam asosiasi

pengusaha kerajinan rotan pekanbaru. Data ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, sementara metode kualitatif data tertulis berupa pernyataan atau hasil pengamatan di lapangan disajikan secara deskriptif.

Untuk menganalisis data hasil identifikasi terhadap faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta faktor-faktor eksternal seperti peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) di dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pengrajin rotan Kota Pekanbaru. Hasil identifikasi dari setiap aspek internal dan eksternal tersebut menjadi dasar didalam melaksanakan analisis SWOT yang nantinya akan menjadi landasan bagi penyusunan program pemberdayaan masyarakat pengrajin rotan Kota Pekanbaru.

Metode Penyusunan Program

Penyusunan program dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dimana dilibatkan yaitu para stakeholders terkait dengan program. Diskusi kelompok dikoordinir bersama antara perwakilan lembaga terkait seperti Dinas Perindustrian Provinsi Riau, universitas dan para pengrajin rotan yang tergabung ke dalam kelompok asosiasi pengrajin rotan Pekanbaru. Penyusunan program berawal dari identifikasi potensi dan permasalahan para pengrajin rotan melalui analisis SWOT melalui diskusi kelompok terarah tahap pertama. Selanjutnya dari hasil diskusi kelompok tahap pertama pengkaji merumuskan berbagai bentuk strategi guna

pengembangan kerajinan rotan Kota Pekanbaru. Melalui diskusi tersebut ditentukan strategi-strategi yang dianggap sebagai prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya para pengrajin rotan di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT

a. Faktor Internal

Faktor internal mendeskripsikan kondisi kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) dari masyarakat pengrajin rotan di Pekanbaru. Dalam hal ini,

pengidentifikasi lebih difokuskan kepada aspek yang paling penting yang menjadi permasalahan utama pengembangan kerajinan rotan Pekanbaru.

Melalui diskusi dengan melibatkan unsur masyarakat yang tergabung kedalam Asosiasi Industri Rotan (ASPRI) Pekanbaru, diperoleh sebanyak 6 faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan masyarakat pengrajin rotan, yakni : (1) Faktor Organisasi dan Kelembagaan, (2) Faktor Sumber Daya Manusia, (3) Faktor Produk dan Produksi, (4) Faktor Permodalan, (5) Faktor Kemitrausahaan, dan (6) Faktor Pemasaran.

TABEL - 3
Faktor Internal Industri Kerajinan Rotan

No	Simbol	Aspek	Bobot (%)	Strengths		Weaknesses	
				Skor	Nilai	Skor	Nilai
1	FI1	Organisasi dan Kelembagaan	15	0	0	4	0.60
	FI11	Izin Usaha		0		4	
	FI12	Bentuk Usaha		0		4	
	FI13	Struktur Organisasi		0		4	
2	FI2	Sumber Daya Manusia	20	1	0.20	1.5	0.30
	FI21	Jumlah Karyawan		0		2	
	FI22	Tingkat Pendidikan		0		1	
	FI23	Pengalaman Kerja		4		0	
	FI24	Kemampuan Manajerial		0		3	
3	FI3	Produk dan Produksi	20	1	0.20	1.4	0.28
	FI31	Tingkat Produksi per bulan		2		0	
	FI32	Keragaman Produk		3		0	
	FI33	Bahan Baku		0		2	
	FI34	Teknologi Produksi		0		3	
	FI35	Pengendalian Mutu		0		2	
4	FI4	Permodalan	20	0	0	2	0.40
	FI41	Aset		0		2	
	FI42	Omset per tahun		0		2	
5	FI5	Kemitrausahaan	10	1.67	0.16	3	0.30
	FI51	Dengan Lembaga Pemerintah		0		4	
	FI52	Dengan Lembaga Non Pemerintah		0		2	
	FI53	Dengan Lembaga Asosiasi		5		0	
6	FI6	Pemasaran	15	1	0.15	1.5	0.22
	FI61	Strategi Pemasaran		0		3	
	FI62	Pasar Sasaran		2		0	
T o t a l			100		0.71	2.10	
Nilai Akhir				Selesih - W = 2.10 – 0.71 = 1,39			

b. Analisis Faktor Eksternal

Kondisi eksternal berkait dengan peluang (*opportunities*) serta tantangan (*threats*) yang kerap

dihadapi oleh masyarakat para pengrajin rotan di Pekanbaru. Melalui proses diskusi bersama dengan masyarakat pengrajin rotan yang

tergabung ke dalam Asosiasi Industri Rotan (ASPRI) Pekanbaru, ditetapkan 6 (enam) faktor eksternal yang turut mempengaruhi perkembangan usaha kerajinan rotan masyarakat di Pekanbaru, yakni (1) Kebijakan Pemerintah

Daerah (2) Keberadaan Lembaga Permodalan (3) Keberadaan Lembaga Pembinaan, (4) Persaingan Perdagangan, (5) Lingkungan dan Kebijakannya, (6) *Image* Produk di Masyarakat.

TABEL 4
Faktor Eksternal Masyarakat Pengrajin Rotan

No	Simbol	Aspek	Bobot (%)	Opportunities (O)		Threats (T)	
				Skor	Nilai	Skor	Nilai
1	FE1	Kebijakan Pembangunan Daerah	20	3.67	0.73	0	0
	FE11	Program Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur		4		0	
	FE12	Kebijakan Otonomi Daerah		3		0	
	FE13	Riau menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan PON 2012		4		0	
2	FE2	Keberadaan Lembaga Permodalan	20	3.67	0.73	0.33	0.06
	FE21	Lembaga Keuangan Perbankan		3		1	
	FE22	Koperasi		4		0	
	FE23	Lembaga Keuangan Mikro		4		0	
3	FE3	Keberadaan Lembaga Pembinaan	20	2.67	0.53	0	0
	FE31	Dinas dan lembaga pembinaan pemerintah		3		0	
	FE32	Program Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi		3		0	
	FE33	Program CSR Perusahaan Swasta		2		0	
4	FE4	Persaingan Perdagangan	15	1	0.15	3.5	0.52
	FE41	Penerapan AFTA		2		3	
	FE42	Keberadaan Produk Sejenis		0		4	
5	FE5	Lingkungan dan Kebijakannya	15	2.67	0.40	2	0.30
	FE51	Kondisi Lingkungan Tempat Usaha		2		4	
	FE52	Kondisi Alam dan Keijakan pemanfaatannya		3		2	
	FE53	Kondisi Geografis Wilayah		3		0	
6	FE6	<i>Image</i> Produk di Masyarakat	10	1	0.1	2.5	0.25
	FE61	Produk Tradisional		2		3	
	FE62	<i>Product trend</i>		0		2	
Total Bobot Skor				2.64		1.13	
Nilai Akhir				Selisih O = (2.64 – 1.13) = 1.51			

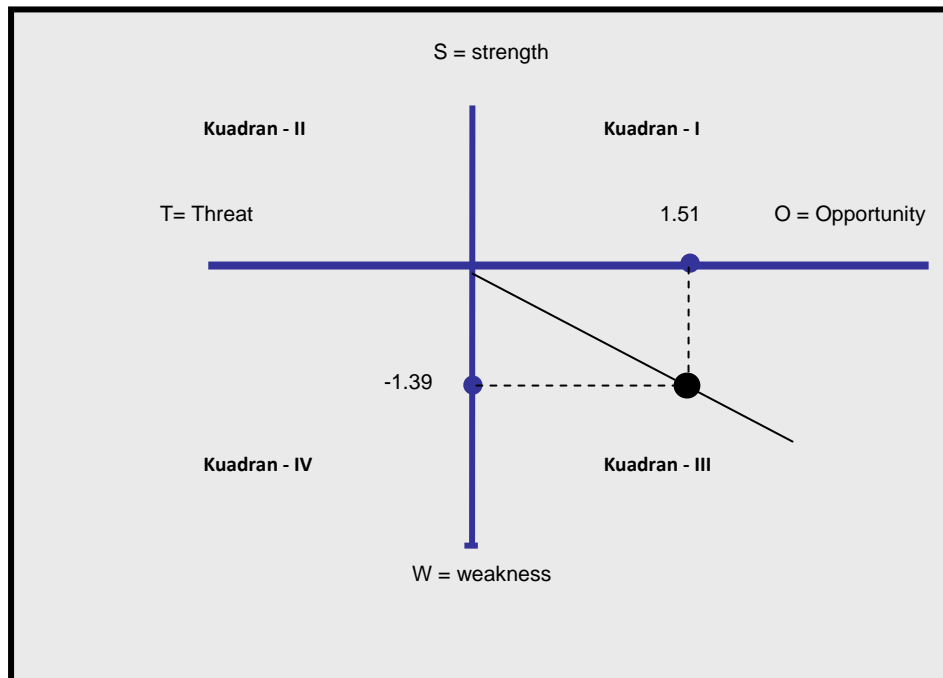
Peta Posisi Kekuatan

Untuk mengetahui strategi yang paling tepat, terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan terhadap setiap aspek dilihat dari kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman. Peta kekuatan ini terdiri dari empat kuadran yang menunjukkan atau menggambarkan posisi dari setiap aspek yang diperhatikan. Masing-masing kuadran mengarahkan kepada strategi pengembangan yang berbeda dengan tingkat prioritas yang juga berbeda.

Dari hasil penilaian terhadap setiap faktor, baik faktor internal dan eksternal, diketahui bahwa nilai skor kekuatan (S) adalah sebesar 0,71 dan nilai skor kelemahan (W) sebesar 2.10. Dengan mencari selisih antara S dan W, dapat diketahui posisi faktor internal cenderung berada pada posisi W dengan nilai akhir faktor internal sebesar – 1.39.

Sedangkan untuk faktor eksternal yang terdiri dari faktor peluang (O) dengan nilai skor 2,64 dan ancaman (T) dengan nilai skor 1.31.

Dengan mencari selisih nilai antara O dan T beranda pada posisi O dengan nilai akhir faktor diketahui bahwa faktor eksternal cenderung eksternal sebesar 1.51.



Gambar 2. Peta Posisi Kekuatan

Strategi Pengembangan

Untuk dapat menyusun program yang tepat, perlu terlebih dahulu dirancang strategi pengembangan yang mungkin dapat dilaksanakan. Penyusunan rencana strategi pengembangan, lebih diarahkan kepada aspek-aspek yang masih menjadi kelemahan serta memiliki peluang dan potensi yang baik untuk dikembangkan. Secara lengkap strategi pengembangan dapat dilihat pada matriks SWOT yang dijabarkan melalui Tabel 5.

Terdapat empat strategi yang dapat dijalankan berdasarkan hubungan antara setiap faktor internal yang terdiri dari kekuatan (S) dan kelemahan (W) dengan faktor eksternal yang terdiri dari faktor peluang (O) dan ancaman (T).

Adapun keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Strategi SO** dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.
2. **Strategi WO** yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. **Strategi ST** yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. **Strategi WT** yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

TABEL – 5.
Matrik SWOT

<div style="text-align: center;"> Faktor Eksternal Faktor Internal </div>		OPPORTUNITY (PELUANG)				THREAT (ANCAMAN)			
		Program kebijakan ekonomi dari Pemerintah Daerah	Keberadaan lembaga keuangan dan permodalan seperti perbankan dan lembaga keuangan mikro	Keberadaan lembaga pembinaan baik pemerintah, institusi pendidikan maupun swasta	Kondisi lingkungan, geografis, kebijakan dan pemanfaatannya	Penerapan perdagangan bebas AFTA di Asia Tenggara	Persaingan dengan produk sejenis dengan nilai kualitas yang lebih baik	Kondisi lingkungan usaha yang rawan banjir	Image masyarakat terhadap produk kerajinan rotan
		1	2	3	4	1	2	3	4
STRENGTH (KEKUATAN)		STRATEGI SO				STRATEGI ST			
Pengalaman Kerja karyawan/ masyarakat pengrajin rotan	1	1. Meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang teknis dan pemasaran dengan lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan melalui Asosiasi pengrajin rotan 2. Meningkatkan akses pasar melalui kerjasama dengan pemerintah dan swasta yang dapat menghubungkan antara masyarakat dengan konsumen nasional dan internasional.				1. Meningkatkan kualitas produk melalui proses kreatif dan inovasi sehingga menghasilkan produk yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman dan gaya hidup. 2. Meningkatkan keragaman produk dengan mengkombinasikan dengan bahan lain selain rotan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku rotan.			
Tingkat Produksi	2								
Keragaman Produk	3								
Kemitrausahaan dengan Asosiasi	4								
Target Pasar	5								
WEAKNESS (KELEMAHAN)		STRATEGI WO				STRATEGI WT			
Belum memiliki Izin Usaha, Bentuk Organisasi, Struktur organisasi tidak jelas	1	1. Program pembinaan dan pemberdayaan pada bidang-bidang manajerial, administrasi dan organisasi. 2. Pembentukan kemitraan dalam menyediakan bahan baku melalui proses pembudidayaan 3. Perancangan program kerja pada lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu masyarakat pengrajin rotan dalam bentuk pembinaan bidang-bidang manajemen.				1. Meningkatkan promosi dan penggalakan penggunaan produk dalam negeri kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai lambang jati diri bangsa, seperti halnya Kain Batik yang telah me Nasional. 2. Realokasi kawasan industri kerajinan pada tempat-tempat yang lebih strategis dan sesuai peruntukannya bagi pengembangan industri kecil dan menengah seperti hanya kerajinan rotan.			
Jumlah karyawan kurang memadai, tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, kurang kemampuan manajerial	2								
Ketersediaan bahan baku masih rendah, teknologi masih sederhana, mekanisme pengendalian mutu belum baik	3								
Tingkat kepemilikan aset masih rendah dan tingkat pemerolehan omset masih rendah	4								
Masih kurang hubungan kemitrausahaan dengan pemerintah dan swasta	5								
Belum memiliki strategi pemasaran yang baik.	6								

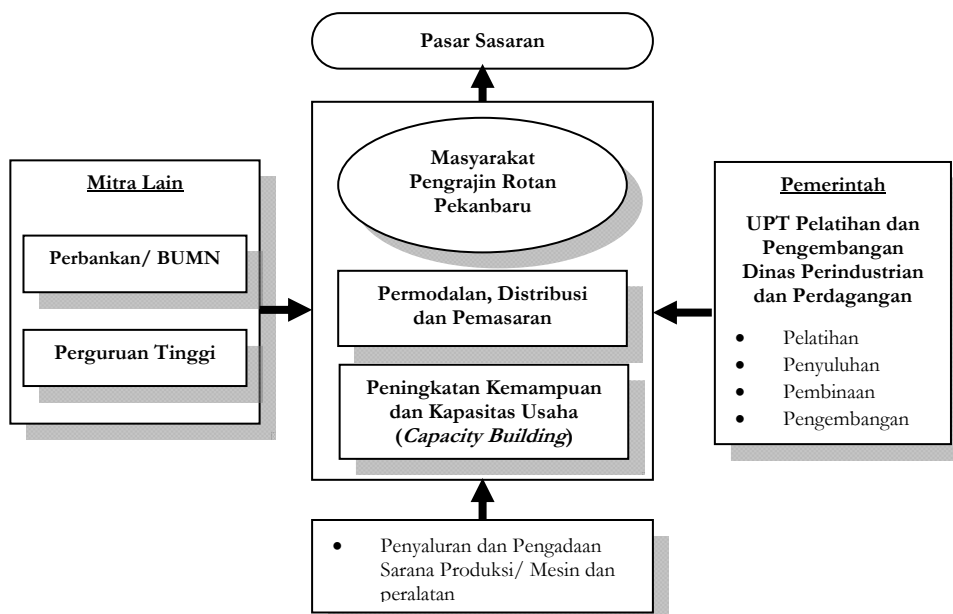
Peran Kelembagaan dalam Program Pemberdayaan

Selain melaksanakan program-program tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada melalui penerapan strategi diatas, saat ini program pemberdayaan merupakan suatu solusi yang dapat diyakini untuk menciptakan kemandirian bagi masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat secara langsung menangkap permasalahan yang mereka hadapi dan secara mandiri bersama dengan setiap unsur masyarakat lainnya, bahu membahu untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.

Seiring dengan perannya sebagai bagian dari pelaksana pembangunan, UPT Pelatihan dan Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu instansi yang dapat menjadi pelopor dan pembina dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pengrajin rotan Pekanbaru. Sesuai tugas dan perannya, UPT Pelatihan dan Pengembangan lebih menitik beratkan tugasnya pada aspek-aspek yang bersifat

peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). UPT Pelatihan dan Pengembangan tidak menjalankan peran sebagai lembaga penyedia permodalan seperti halnya lembaga perbankan ataupun beberapa BUMN/ BUMD.

Untuk dapat mewujudkan program pemberdayaan kepada masyarakat pengrajin rotan tersebut, UPT Pelatihan dan Pengembangan secara internal telah mempersiapkan diri baik dari segi fasilitas, maupun sumber daya manusia. Namun untuk bisa terlaksananya program secara lebih baik, tentu membutuhkan anggaran yang cukup. Hal ini dapat dilaksanakan dengan membentuk kerja sama lain dengan lembaga penyediaan keuangan atau permodalan seperti lembaga perbankan ataupun BUMN. Dan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran pada pogram pemberdayaan, UPT dapat menjalin hubungan yang bersifat akademis dengan lembaga pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.



Gambar 3. Hubungan kolaborasi antara berbagai bidang dalam kegiatan pemberdayaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melalui analisis SWOT dapat diperoleh sebanyak 6 faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan masyarakat pengrajin rotan, yakni : (1) Faktor Organisasi dan Kelembagaan, (2) Faktor Sumber Daya Manusia, (3) Faktor Produk dan Produksi, (4) Faktor Permodalan, (5) Faktor Kemitrausahaan, dan (6) Faktor Pemasaran. Melalui penilaian secara berkelompok dengan metode diskusi terfokus dan terarah dapat diketahui bahwa total nilai faktor kelemahan (W) sebesar 2.10 dan total nilai faktor kekuatan (S) sebesar 0.71. Sehingga faktor internal lebih cenderung memiliki tingkat kelemahan (W) lebih tinggi dibandingkan kekuatan (S) dengan nilai total skor sebesar 1.39.
- b. Melalui analisis SWOT dapat pula diketahui bahwa terdapat 6 (enam) faktor eksternal yang menjadi faktor peluang (O) dan ancaman (T) pengembangan usaha kerajinan rotan di Pekanbaru. Keenam faktor tersebut adalah : (1) Kebijakan Pemerintah Daerah (2) Keberadaan Lembaga Permodalan (3) Keberadaan Lembaga Pembinaan, (4) Persaingan Perdagangan, (5) Lingkungan dan Kebijakannya, (6) *Image* Produk di Masyarakat. Melalui diskusi dan analisis

secara berkelompok terhadap aspek-aspek yang terdapat pada faktor eksternal tersebut, dapat pula diketahui bahwa nilai faktor peluang (O) yang ada dimasyarakat masih cukup tinggi yakni sebesar 2,64 sedangkan nilai faktor ancaman (T) yang mungkin terjadi adalah sebesar 1.13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat peluang masih cukup besar bagi pengembangan usaha kerajinan rotan di Pekanbaru dengan nilai total skor sebesar 1.51.

- c. Untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui pemanfaatan peluang yang tersedia di masyarakat, maka beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai wujud program pemberdayaan antara lain adalah : (1) identifikasi permasalahan usaha kerajinan rotan di masyarakat dengan melibatkan asosiasi pengrajin rotan Pekanbaru, (2) pembentukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait dalam upaya membantu pengembangan masyarakat pengrajin rotan Pekanbaru (3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan untuk lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan masyarakat di dalam upaya mengembangkan usahanya, (4) Melaksanakan dan ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi agar produk rotan lebih dikenal dan dekat masyarakat dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat, (5) melaksanakan kegiatan

monitoring, pendampingan dan perbaikan selama proses usaha berlangsung secara kontinyu dan terjadwal, sehingga diharapkan segala permasalahan semaki dapat teratasi oleh masyarakat secara mandiri.

Saran-saran.

Program pemberdayaan merupakan suatu alat yang dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pada saat ini, dihadapkan kepada permasalahan –permasalahan yang jika ditangani secara individu akan sulit untuk terpecahkan. Oleh kerannya setiap pihak perlu saling bahu membahu untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang menyentuh kepada sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil. Setiap instansi dan lembaga, memiliki peran yang cukup dominan demi terwujudnya program pemberdayaan masyarakat pengrajin rotan di Pekanbaru. Melalui pelaksanaan tugas yang lebih tepat sasaran dan melalui pembentukan kerjasama dengan instansi lainnya, diharapkan pemerintah dapat menjadi pelopor sekaligus penggerak yang dapat mendukung usaha masyarakat untuk dapat hidup dan berkembang secara mandiri, semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ahmad Nursal, 2005, *Dampak Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Pengembangan Industri Kecil di Kota Pekanbaru Propinsi Riau*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang
- Arsyad Asparaini, 2002. *Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Propinsi Riau*. Makalah pada Semiloka Mencari Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Tanggal 8 Oktober 2002, Pekanbaru.
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, 2009, *Profil UPT Pelatihan Dan Pengembangan Industri*, Pekanbaru
- Eko Sutoro, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda.
- Elinuri, 2004, *Model Keputusan Ekonomi Rumah tangga Industri Produk Jadi Rotan (Studi Kasus Industri Rotan Kota Pekanbaru)*, Pascasarjana IPB Bogor.
- Gunardi dan Sarwoprasodjo. S. 2003. *Pengantar Pengembangan Masyarakat*. Bogor. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB.
- Kementrian Prindustrian, 2013., *Laporan Kemajuan Program Kerja Kementrian Perindustrian Tahun 2004 – 2012*. Jakarta.
- Mubyarto, 2002, *Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ekonomi Kerakyatan.
[Http://www.ekonomirakyat.org/edisi7/artikel/html](http://www.ekonomirakyat.org/edisi7/artikel/html).
- Pemerintah Provinsi Riau. 2001, *Peraturan Daerah Propinsi Riau No 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau tahun 2001 – 2005*, Pekanbaru.

- Pemerintah Provinsi Riau, 2010, *Strategi & Implementasi Pembangunan Nasional Di Daerah (Provinsi Riau)*, Pekanbaru
- Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, 2001, *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Saragih, J dkk. 2000. *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta.
- Sayogyo dan Tambunan, 1992. *Industrialisasi Pedesaan*, Rajawali, Jakarta
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar & IDEA
- Syaifuddin dan Chotimin 1994, *Dimensi Strategi Pengembangan Industri Kecil*, Agatiga Bandung
- Zulkarnain, 2001, *Mengembangkan Ekonomi Rakyat : Persepsi tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi di Riau*, Unri Press, Pekanbaru
- Zulkarnain, 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi tentang Perekonomian Rakyat*. Adicipta Karya Nusa, Yogyakarta.